

ABSTRAK

Pelunasan ganti rugi korban Lumpur Lapindo yang tidak sesuai peraturan menjadi masalah serius bagi korban. Hal tersebut dikarenakan keterlambatan pembayaran yang sampai sembilan tahun baru bisa lunas. Penelitian dengan judul *“Dana Ganti Rugi Dan Sistem Pelunasan Korban Lumpur Lapindo Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Ds. Renokenongo Kec. Porong Kab. Sidoarjo)”* ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan nilai ganti kerugian dan sistem pelunasan dana ganti rugi kepada korban Lumpur Lapindo dalam perspektif ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *key person*, dan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data. Metode pemeriksaan data menggunakan triangulasi dan pengecekan anggota.

Dalam penelitian ini hasil penelitian berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan tentang penetapan ganti kerugian dan sistem pelunasan korban Lumpur Lapindo dalam perspektif ekonomi Islam yaitu penetapan ganti kerugian yang diberikan PT Lapindo Brantas sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, hal ini dikarenakan dalam penentuannya dilakukan musyawarah dengan pihak korban dan juga nilai ganti kerugian melebihi nilai harga yang seharusnya. Kemudian tentang sistem pelunasan ganti rugi pada korban Lumpur Lapindo tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan keterlambatan pelunasan yang tidak sesuai janji dan kesepakatan yang telah tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Ingkar Janji, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Repayment indemnity of Lapindo victims who do not fit the regulations become serious problems for victims. That's because retardant in payment to nine years can only be paid off. Title this research is "Fund Change and Redemption Loss Lapindo Mudflow Victims Systems in the Perspective of Islamic Economics (Case Study Renokenongo village. Porong Sidoarjo)" aims to find out how the system of payment of compensation fund for victims of Lapindo Mud in the perspective of Islamic economics.

The type of research is qualitative primary data and secondary sources. Sample was taken using the key person, and collecting data through interviews and documentation. The research using reduction analysis. Methods of inspection using triangulation and member checks.

The results of research based on the discussion can be concluded regarding the determination of compensation and repayment system of the Lapindo Mud victims in the perspective of Islamic economics, namely the determination of compensation given by PT Lapindo Brantas after the Islamic economic principles because in its determination to do consultation with the victim and also compensation value exceeds the value of the price should be. Later on the settlement system of compensation to victims of Lapindo mudflow is not in accordance with the principles of Islamic economics because the delay repayment of incompatible promises and agreements that have been stipulated in Presidential Regulation No. 14 of 2007.

Keywords: Indemnity, Dissenters appointments, the Islamic Economy